



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.409217/2023**



DS:7151-5885-9480-8003

**Revisi ke 01**

Tanggal : 08 Februari 2023

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI   |
| 2. Unit Organisasi            | : (10)     | Badan Pembinaan Hukum Nasional   |
| 3. Provinsi                   | : (18)     | SULAWESI TENGAH  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (409217) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 1.906.606.000 ( SATU MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM JUTA ENAM RATUS ENAM RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	1.906.606.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                 |           |               |
|-----------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN P A L U | (051) Rp. | 1.906.606.000 |
|-----------------|-----------|---------------|

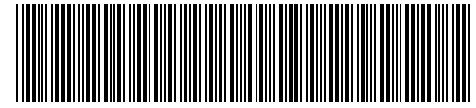
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2023**



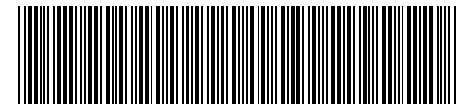
DS:7151-5885-9480-8003

Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

---

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	147.855.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	147.855.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.758.751.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	1.758.751.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



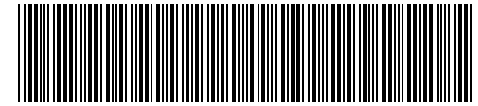
DS:7151-5885-9480-8003

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			147.855.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			147.855.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	62.082.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	62.082.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	85.773.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	85.773.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.758.751.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			1.758.751.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	17,00	Kelompok Masyarakat	145.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	15,00	Kelompok Masyarakat	108.210.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	36.790.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7151-5885-9480-8003

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		16,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	90.409.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	16,00	Lembaga	90.409.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	104.612.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	layanan	101.002.000
		:	02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum	1,00	layanan	3.610.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		152,00	Orang	1.216.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	152,00	Orang	1.216.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		19,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	202.730.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	19,00	Kegiatan	202.730.000

Jakarta, 30 November 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

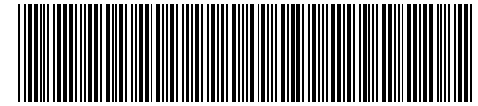
ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2023**

**I B. SUMBER DANA**



DS:7151-5885-9480-8003

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
 Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	1.906.606.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.906.606.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



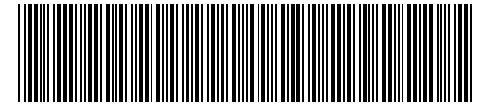
DS:7151-5885-9480-8003

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409217	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	-	1.906.606	-	-	-	1.906.606		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	147.855	-	-	-	147.855		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	147.855	-	-	-	147.855		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	62.082	-	-	-	62.082	18.51	
01	RM	-	62.082	-	-	-	62.082	051	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	85.773	-	-	-	85.773	18.51	
01	RM	-	85.773	-	-	-	85.773	051	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.758.751	-	-	-	1.758.751		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	1.758.751	-	-	-	1.758.751		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	145.000	-	-	-	145.000	18.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7151-5885-9480-8003

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	145.000	-	-	-	145.000	051	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	90.409	-	-	-	90.409	18 . 51	
01 RM		-	90.409	-	-	-	90.409	051	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	104.612	-	-	-	104.612	18 . 51	
01 RM		-	104.612	-	-	-	104.612	051	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	1.216.000	-	-	-	1.216.000	18 . 51	
01 RM		-	1.216.000	-	-	-	1.216.000	051	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	202.730	-	-	-	202.730	18 . 51	
01 RM		-	202.730	-	-	-	202.730	051	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.906.606</b>	-	-	-	<b>1.906.606</b>		

Jakarta, 30 November 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2023  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7151-5885-9480-8003

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

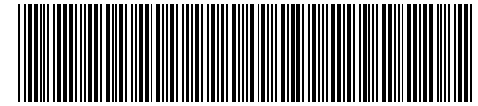
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409217	<b>KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	54.953	371.872	178.502	291.097	227.105	66.298	97.493	515.729	26.216	77.341	0	1.906.606
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	54.953	371.872	178.502	291.097	227.105	66.298	97.493	515.729	26.216	77.341	0	1.906.606
013.10.BB.5256		Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	5.985	11.535	900	2.787	10.680	25.884	26.198	48.030	15.856	0	0	147.855
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	5.985	11.535	900	2.787	10.680	25.884	26.198	48.030	15.856	0	0	147.855
013.10.BF.4841		Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	48.968	360.337	177.602	288.310	216.425	40.414	71.295	467.699	10.360	77.341	0	1.758.751
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	48.968	360.337	177.602	288.310	216.425	40.414	71.295	467.699	10.360	77.341	0	1.758.751

Jakarta, 30 November 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2023  
IV A. B L O K I R**



DS:7151-5885-9480-8003

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [409217] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2023  
IV B. C A T A T A N**



DS:7151-5885-9480-8003

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [409217] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001